

Strategi Perlawanan World Social Forum terhadap Globalisasi Neoliberal (2001-2008)

B. Aswin Wiyatmoko

*Mahasiswa Program Magister Hubungan Internasional
Universitas Airlangga*

ABSTRAK

World Social Forum (WSF) has been emerged as an idea that the global south needs a space for sharing ideas, reflective thinking and creating proposal towards fairness at global order. Since established in 2001, WSF has not been able to build alternative thinking which distinctively produced by WSF mechanism. It leads to a question why WSF has not been able to produce the alternative thinking. The concept of empire-multitude is used to answer that question. Based on falsification methods, WSF has been failed because of using the multitude strategy. Vague target, unequal participant proportionality, anarchy of decision making and dependency of external support are the problems lead by strategy failure. The failure has resulted the WSF stagnation to build an alternative thinking facing neoliberal globalization.

Keywords: *WSF, multitude, stagnation, strategy.*

Forum Sosial Dunia muncul sebagai gagasan bahwa Selatan membutuhkan ruang untuk berbagi ide dan pemikiran reflektif dalam merancang tata dunia yang adil. Sejak didirikan pada 2001, WSF belum mampu membangun pemikiran alternatif yang khas forum ini. Akibatnya, muncul pertanyaan mengapa WSF belum mampu menghasilkan pemikiran alternatif tersebut. Berdasarkan metode analisis falsifikasi dan konsep empire-multitude, ditemukan jawaban bahwa WSF telah gagal karena menggunakan strategi multitude. Ketidakjelasan target, ketidaksetaraan proporsionalitas peserta, anarki pengambilan keputusan, dan ketergantungan dukungan eksternal merupakan masalah yang menyebabkan kegagalan strategi itu. Kegagalan tersebut mengakibatkan stagnasi WSF untuk menciptakan pemikiran alternatif terhadap globalisasi neoliberal.

Kata-Kata Kunci: *WSF, multitude, stagnasi, strategi.*

World Social Forum (WSF) tidak hadir dalam ruang dan waktu yang hampa. Kemunculannya didahului oleh peristiwa-peristiwa monumental terutama terkait perlawanan terhadap globalisasi neoliberal. Gerakan pertama yang mengilhami dibentuknya WSF adalah gerakan antiperjanjian multilateral tentang investasi (Multilateral Agreement on Investment/MAI) (*Media Democracy Project*, 2005). Perjanjian MAI merupakan perjanjian yang diusulkan oleh Overseas Economic Cooperation and Development (OECD) untuk menyusun peraturan bagi liberalisasi secara luas. Perlawanan atas perjanjian MAI ini ternyata mampu menyatukan berbagai latar belakang masyarakat baik dari berbagai daerah maupun berbagai kepentingan. Puncaknya, pada 30 November 1999 muncul protes besar terhadap pelaksanaan WTO yang menyebabkan penundaan pelaksanaan WTO. Protes yang sering disebut *Battle of Seattle* atau N30 ini menunjukkan bahwa gerakan perlawanan mampu dilakukan terhadap globalisasi neoliberal (Hamel et al. 2001, 42).

Keberhasilan dalam protes tersebut ternyata tidak menghentikan globalisasi neoliberal untuk tetap melangkah. Salah satu indikatornya adalah tetap diadakannya Forum Ekonomi Dunia (World Economic Forum / WEF) yang diadakan tiap tahun di Davos, Swiss. Forum ini merupakan korporasi besar yang terdiri atas berbagai negara kapitalis dan institusi internasional pendukungnya serta MNC yang bertujuan untuk memberikan arahan bagi perekonomian global. Dengan kata lain, WEF adalah tempat konstitusi ekonomi global dituliskan (Jhamtani 2003, 14). Hal tersebut mengilhami Bernard Cassen dari ATTAC serta Oded Grajew dan Francisco Whitaker dari Braziliaian Justice and Peace Commission (CBJP) untuk membahas kemungkinan diadakannya suatu strategi perlawanan baru. Strategi perlawanan ini harus mampu mengakomodasi berbagai elemen masyarakat untuk tidak hanya sekedar anti terhadap globalisasi neoliberal, tetapi juga memberikan alternatif tatanan dunia baru sehingga menunjukkan bahwa *another world is possible*. Hal tersebut dimanifestasikan pada 25 Januari-30 Januari 2001 dengan terlaksananya WSF yang pertama di Porto Alegre, Braziliaia (Tevainen 2003).

Pertemuan pertama WSF membahas strategi dan juga visi WSF untuk ke depannya. Berdasar pertemuan tersebut disepakati bahwa WSF merupakan *open meeting place* yang bertujuan untuk merefleksi pemikiran, memformulasikan alternatif serta berbagi pengalaman dan melaksanakan aksi yang efektif (Charter of Principle 2001, poin 1 dan 2). Alternatif dan hal – hal lain yang diperbincangkan tersebut bertujuan sebagai oposisi terhadap globalisasi neoliberal yang dijalankan oleh MNCs serta pemerintah dan institusi internasional yang bergerak dalam kerangka yang sama (Charter of Principle 2001, poin 4).

Secara struktur keorganisasian, WSF memiliki karakteristik yang berbeda dibanding dengan organisasi pada umumnya. WSF tidak memiliki *body* atau struktur organisasi secara vertikal. Artinya, tidak ada pihak yang memiliki otoritas atau mengekspresikan posisinya sebagai klaim WSF. Hal ini juga berarti tidak ada keputusan mengikat dari WSF sebagai sebuah *body*. Struktur yang demikian merupakan struktur horizontal yang ditujukan supaya tidak ada lokus *power* yang diperebutkan dan memberi peluang yang sama bagi anggota WSF (Charter of Principle 2001, poin 5-6). Dilihat dari sisi keanggotaan, WSF terdiri atas anggota yang plural, nonpemerintah dan nonpartai. Hal ini ditujukan untuk membuka peluang bagi seluruh diversitas ras, gender, etnis dan kebudayaan secara adil serta menghindari munculnya kepentingan partai maupun negara. Sekalipun ada tokoh negara atau partai yang ingin ambil bagian, maka harus berbicara atas nama pribadi. Solidaritas dan *trust* menjadi hal yang utama dalam pelaksanaan WSF (Charter of Principle 2001, poin 9-10). WSF memiliki karakteristik yang unik pula jika dilihat dari bentuk perlawanannya. WSF mengambil jalan *nonviolence* untuk menghindari pertumpahan darah serta menghargai humanisasi. WSF sendiri lebih merangkul masyarakat kelas bawah dari seluruh dunia untuk menciptakan suatu alternatif *globalization from below*. Hal ini yang dimanifestasikan dalam bentuk forum yang dilaksanakan secara *annual* (Charter of Principle 2001, poin 13).

Pemaparan di atas menunjukkan idealisme yang tinggi dari WSF. Tak salah kemudian jika WSF menghadirkan harapan terhadap pembebasan kaum *global south* seperti yang digambarkan sebagai *The End of The End of History* (Klein 2002), *Wind of Change* (Burbach 2002) dan *Festival of The Oppressed* (Callinicos 2004). Kendati demikian, ada hal yang terlewatkan jika kita lihat secara lebih kritis. Hal tersebut adalah realita bahwa tidak ada implementasi alternatif WSF secara nyata berlaku secara global kecuali protes – protes jalanan di tiap negara atau pada pertemuan WTO, IMF dan WB. Hal ini tak ubahnya seperti protes – protes yang biasa dilakukan aktivis – aktivis nasional dalam mengkritik pemerintahannya. Proposal – proposal yang dihasilkan sangat minim implementasi dan seringkali hanya sekedar berhenti dalam bentuk pembicaraan (Teivainen 2009).

WSF sebenarnya mendesakkan berbagai rekomendasi program seperti *tobin tax*, ide *postcapitalism*, demilitarisasi, pemisahan korporasi dengan negara, mengutuk perang terhadap terorisme dan mendesak pemerataan pembangunan. Namun, hal tersebut bukan merupakan ide yang dihasilkan murni sebagai ide distingsi WSF. Kendati demikian, WSF sebenarnya telah mencoba membuat program yang bertujuan menciptakan alternatif dari dasar yaitu Popular University of Social Movements (PUSM) pada tahun 2003. Program ini mengumpulkan berbagai pelajar di tingkat dunia untuk dikumpulkan pada satu forum

terdiri atas kuliah umum, pelatihan dan *sharing* perjuangan di tiap negara. Namun, program ini juga harus terhenti seiring tidak adanya pelaksanaan WSF tahun 2008 (Smith & Smythe 2010). Hal ini yang pada akhirnya menjadi pertanyaan mengapa WSF belum berhasil dalam menciptakan ide – ide alternatif terhadap globalisasi neoliberal hingga tahun 2008.

Multitude: Strategi Perlawanan dan Kritik

Berdasar Charter of Principle yang telah disebutkan sebelumnya, dapat disarikan empat komponen strategi yang digunakan WSF. Pertama adalah identifikasi lawan sebagai globalisasi neoliberal. Kedua adalah mengedepankan pluralitas sebagai cara mengakomodasi berbagai kepentingan terkait globalisasi neoliberal tersebut. Ketiga, pluralitas tersebut disatukan dengan bentuk forum yang tidak memiliki struktur sehingga partisipan di dalamnya memiliki kedudukan sama. Keempat, independensi dalam pelaksanaannya, terutama terkait dengan independensi dari pemerintah dan partai politik.

Strategi yang digunakan oleh WSF ini memiliki kemiripan dengan strategi perlawanan *multitude* yang digambarkan oleh Michael Hardt dan Antonio Negri. Pertama, strategi perlawanan *multitude* secara natural ditujukan untuk melawan imperium. Hal ini ditunjukkan dengan adanya posisi *vis a vis* antara imperium – *multitude*, suatu kesamaan dengan posisi globalisasi neoliberal *vis a vis* WSF. Kedua, strategi perlawanan *multitude* merupakan strategi yang pluralistik dan berstruktur horizontal. Ketiga, strategi perlawanan *multitude* tidak menggunakan kekerasan dan mengutamakan intelektualitas *network* sebagai jalan perjuangannya. Terakhir, strategi perlawanan *multitude* menegakkan independensi dalam perjuangannya dengan asumsi *live within empire alternatively* (Hardt dan Negri 2004).

Strategi perlawanan *multitude* nampak demokratis dalam strategi perlawanannya. Namun, hal ini tidak cukup menghindarkan *multitude* atas kritik terhadapnya. Pertama, *multitude* dikritik karena kesulitannya mengidentifikasi siapa yang disebut imperium. Imperium yang digambarkan oleh Hardt dan Negri merupakan konsep yang *vague*, tidak memiliki kejelasan subyek. Imperium hanya digambarkan sebagai sebuah sistem atau *norms* yang dapat dirasakan, namun memiliki *central power* yang terdispersi sehingga sulit diidentifikasi. Kesulitan dalam mengidentifikasi subyek perlawanan ini yang akan menyebabkan kesulitan *multitude* dalam mengadakan perlawanannya (Boron 2005). Kedua, *multitude* dikritik karena mengabaikan proporsionalitas representasi dalam pluralismenya dan hanya mengandalkan *commonality* sebagai perekat antar latar belakang. Permasalahan

representasi dari berbagai identitas ini akan menyebabkan sulitnya *multitude* dalam mencapai kesatuan (McGann 2006, 153). Ketiga, strategi *multitude* yang tanpa struktur dan lebih mengedepankan *rules itself* dinilai justru akan mempersulit kemajuan perlawanan *multitude*. Tanpa adanya *central power*, keadaan internal *multitude* justru akan cenderung anarki. Masing-masing elemen merasa memiliki *power* yang sama sehingga yang ada justru benturan antar *power* tersebut (Bull 2001).

Keempat, *multitude* dikritik karena lebih mengutamakan *imaterial aspect* seperti *network*, teknologi dan *commonality* sebagai perekat elemen di dalamnya. Petras (2006) mengkritik hal tersebut karena *material aspect* seperti kekuatan ekonomi serta kekuatan legal-formal masih sangat signifikan. Kedua hal tersebut yang masih dimiliki oleh negara dan lembaga tradisional lainnya seperti partai politik dan lembaga keuangan. Ironisnya, lembaga-lembaga tersebut kurang mendapat perhatian dari konsepsi imperium – *multitude*.

Problem Perlawanan World Social Forum

Berdasar data-data yang dihimpun penulis, kritik-kritik yang disampaikan pada *multitude* ternyata terjadi pada WSF. Pertama, WSF memiliki kesulitan dalam mengidentifikasi target perlawanan. Dalam strategi perlawanan, menentukan dan memahami karakter dari sasaran perlawanan menjadi hal yang paling utama. Tanpa menentukan secara jelas siapa dan bagaimana yang menjadi lawan kita, maka dipastikan akan memunculkan kesulitan dalam strategi perlawanannya (Foran, 2005). Perlawanan terhadap globalisasi neoliberal tentu membutuhkan perlawanan dalam skala global. Hal ini pula yang mengilhami para pemrakarsa berdirinya WSF untuk membentuk suatu forum perlawanan dalam tingkat global. Namun demikian, dalam realitanya, hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan internal WSF sendiri. Bahkan, perdebatan ini menjadi perdebatan yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Tidak sedikit partisipan WSF yang mengharapkan perlawanan dalam skala nasional. Hal ini disebabkan karena pada akhirnya, permasalahan *welfare* akan kembali kepada permasalahan negara (Gobrin-Morante 2002, 19). Namun, di sisi lainnya muncul kubu yang cenderung berpendapat bahwa seharusnya perlawanan dilakukan dalam skala global. Hal ini disebabkan oleh sentral kekuatan yang tidak lagi berada pada negara, melainkan terdispersi menjadi sistem dalam skala global. Beberapa permasalahan global seringkali berada di luar kewenangan negara lagi.

Perdebatan dalam kubu WSF ternyata juga diwarnai dengan ide bahwa perlawanan WSF seharusnya dikembalikan dalam tingkat lokal. Salah satu pendukung ide ini adalah partisipan dari India. Partisipan dari India mengatakan bahwa Charter of Principle dari WSF tidak sesuai dengan kondisi yang ada di Mumbai. Secara umum, Mumbai dapat dikatakan termasuk kota kapitalis ditandai dengan banyaknya MNC. Namun di sisi lain, Mumbai juga merupakan kota dengan aktivis radikal paling besar di India. Perbedaan kondisi ini menuntut para aktivis untuk terlebih dahulu mengubah sasaran perlawanan menjadi lokal. Bahkan, para aktivis India menuntut adanya keterlibatan partai politik dalam WSF karena satu-satunya dukungan politis mereka adalah dari partai politik (Sen 2004, 72). Lebih menarik lagi, karena ternyata muncul wacana pula untuk melakukan perlawanan dalam skala regional. Hal ini yang melandasi munculnya forum-forum WSF dalam skala regional seperti African Social Forum, Asian Social Forum dan European Social Forum. Wacana ini muncul karena sulitnya melakukan perlawanan dalam skala global, namun juga tidak efektif apabila perlawanan dilakukan dalam skala nasional (Santos 2006). Perdebatan mengenai sasaran perlawanan ini yang pada akhirnya mencapai puncaknya dengan adanya keputusan untuk meniadakan WSF pada tahun 2008 dan mengadakan WSF selama dua tahun sejak 2009.

Sejak tahun 2008 dan pada tahun genap setelahnya-setidaknya sampai tahun 2010, pelaksanaan WSF “diserahkan” kepada masing-masing partisipan bisa dalam bentuk forum lokal, nasional, regional maupun aksi konfrontasi langsung. Perubahan metodologi dari WSF ini sebenarnya dipicu oleh tidak adanya titik temu dalam menentukan di mana lokus perlawanan seharusnya dilakukan (Barnett 2007). Kendati demikian, ada juga pihak yang menganggap perubahan strategi WSF ini justru menunjukkan perkembangan. Perubahan metodologi yang dilakukan WSF ini di satu sisi diklaim sebagai langkah WSF untuk tidak hanya berada pada tataran kata-kata tanpa aksi yang jelas (Savio, 2007). Kubu dalam WSF yang lebih cenderung mendukung aksinya nyata biasanya berasal dari golongan anarkis. Perdebatan memang menjadi hal yang wajar, terutama dalam model forum seperti WSF. Namun, apapun itu, kesulitan WSF dalam menentukan sasaran perlawanan merupakan problem dasar yang berpengaruh terhadap perlawanan WSF. Permasalahan kedua yang timbul adalah ketidakseimbangan proporsionalitas dalam WSF. Data temuan penulis menunjukkan hal yang menarik. Pelaksanaan pada WSF tahun 2001 sampai tahun 2003 ternyata mayoritas dihadiri oleh partisipan dari Braziliaia sendiri. Setelah itu, disusul partisipan dari Argentina di peringkat kedua, Uruguay di peringkat ketiga serta negara lain seperti Italia, Amerika Serikat dan Prancis pada urutan berikutnya (Numbers of WSF 2003). Hal ini serupa dengan WSF tahun 2004 yang ternyata hanya dihadiri partisipan dari luar India sebanyak 10.000 orang. Sisanya, sebanyak

105.000 orang ternyata dihadiri oleh peserta dari India sendiri (Statistics of WSF 2004).

Temuan menarik juga dapat dilihat pada pertemuan WSF tahun 2006 yang diadakan secara polisentrik di Bamako, Mali dan Caracas, Venezuela. Pada pelaksanaan di Caracas, mayoritas partisipan berasal dari dalam negara Venezuela sendiri sebesar 65%. Sisanya, cenderung berasal dari negara-negara tetangga Venezuela di Amerika Latin. Hanya ada 13 % yang berasal dari berbagai belahan dunia lain. Di wilayah lain, pada pelaksanaan di Bamako dapat dilihat kecenderungan yang hampir sama, bahwa mayoritas partisipan berasal dari dalam negara Mali sendiri. Sisanya berasal dari negara tetangga Mali di Afrika dan hanya ada 13,6 % yang berasal dari berbagai belahan dunia lain (Smythe dan Smith 2010). Data yang sama juga ditunjukkan oleh pada pelaksanaan WSF tahun 2005 dan 2007. Pada WSF tahun 2005 yang diselenggarakan di Porto Alegre, partisipan yang hadir mayoritas berasal dari wilayah Amerika Latin. Pada WSF tahun 2007 yang diselenggarakan di Kenya, partisipan mayoritas juga berasal dari Afrika. Data-data di atas menunjukkan bahwa ada kecenderungan partisipan yang hadir dalam WSF berasal dari wilayah-wilayah terdekat dari penyelenggara WSF saja (Institute for Research on World Systems 2008).

Selain itu, WSF banyak dikritik karena didominasi oleh kaum intelektual, atau setidaknya merupakan kaum yang sudah mengenal teknologi dengan baik.

Of still consisting to 70 percent plus of university-educated participants. Nothing wrong with either these participants or those issues, but the WSF intends to represent a 'globalization from below', not the middle. And to represent a holistic alternative in which, for example, women's, peace, indigenous and labor (not just union) issues should have equal weight and be given equal importance (Waterman 2009,1).

Menariknya, dari proporsi 70% dan 30% antara kaum akademisi dan kaum non-akademisi, mayoritas dihadiri oleh partisipan yang mampu membiayai perjalanan dan akomodasi pelaksanaan WSF secara independen. Sebanyak 44,7% partisipan menghadiri pelaksanaan WSF atas biaya sendiri, 15% atas biaya dari institusi pendidikan, 14% berangkat atas biaya dari instansi kerjanya, 10,35% dari organisasi politik dan sisanya atas biaya keluarga, teman dan instansi bisnis (Institute for Research on World System 2007).

Pertanyaanya, apa sebenarnya signifikansi dari ketidakseimbangan proporsionalitas ini? Perbedaan identitas dan latar belakang yang dimiliki oleh partisipan WSF ternyata sangat berpengaruh terhadap agenda yang diperjuangkan dalam WSF maupun pola pikir masing –

masing partisipan terhadap suatu masalah. Penulis mengambil *sample* data pelaksanaan WSF tahun 2005 di Porto Alegre, Braziliaia dan tahun 2007 di Nairobi, Kenya. Menurut data tersebut, cara pandang kedua wilayah tersebut berbeda. Survei pada WSF tahun 2005 menunjukkan bahwa mayoritas peserta berpendapat untuk meniadakan kapitalisme, mengganti IMF dan WTO dengan institusi yang lain, serta berpendapat bahwa WSF seharusnya memiliki posisi dalam berpolitik. Sebaliknya, survei pada WSF tahun 2007 menunjukkan bahwa mayoritas peserta berpendapat untuk mereformasi kapitalisme, IMF dan WTO serta berpendapat bahwa WSF tidak seharusnya memiliki posisi dalam berpolitik (Reese et al., 2008).

Data tersebut menunjukkan bahwa faktor identitas sangat berpengaruh pada perjuangan WSF. Hal ini yang menyebabkan sulitnya WSF dalam delapan tahun perjuangannya menghasilkan suatu langkah yang nyata. Perpindahan tempat pelaksanaan WSF pada akhirnya menjadi hal yang dilematis. Di satu sisi WSF tentu berharap adanya pemerataan tempat pelaksanaan. Namun di sisi lainnya, perpindahan tempat pelaksanaan WSF justru menjadi penghambat kemajuan WSF. Hal ini disebabkan berganti – gantinya proporsi partisipan di setiap pertemuan. Proposal yang dihasilkan pada pertemuan sebelumnya belum tentu dapat dilaksanakan pada pertemuan berikutnya karena partisipan belum tentu memiliki *sustainability* untuk datang.

Kondisi demikian diperparah dengan problem ketiga WSF, anarki yang terjadi dalam pengambilan keputusan di WSF. Dalam Charter of Principle (2001, poin 6) disebutkan bahwa “The meetings of the World Social Forum do not deliberate on behalf of the World Social Forum as a body. No-one, therefore, will be authorized, on behalf of any of the editions of the Forum, to express positions claiming to be those of all its participants.”

Kalimat tersebut menunjukkan bahwa WSF bukan merupakan sebuah badan dan oleh karenanya tidak ada seorangpun yang berhak untuk mengambil keputusan atas nama WSF. Hal ini ditujukan supaya tidak ada lokus *power* yang berada pada satu titik sehingga demokrasi dapat berjalan dengan semestinya (Charter of Principle 2001, poin 6).

Secara ideal, hal tersebut memang merupakan gambaran bagaimana WSF ingin mengakomodasi suara-suara dari partisipannya. Ini merupakan keunggulan WSF dibanding bentuk-bentuk perlawanan lainnya, namun sekaligus menjadi kelemahan WSF. Demokrasi tidak seharusnya dipandang hanya sebagai hal yang struktural atau tidak struktural. Demokrasi, pada hakikatnya merupakan sebuah cara dan juga tujuan. Tujuan ini yang sebenarnya menjadi lebih penting, karena demokrasi dalam tatanan dunia yang sebenarnya menjadi cita-cita WSF.

Pada akhirnya, hal ini menunjukkan bahwa *structurlessness* belum tentu demokratis (Yla-Antilla 2005).

Hal ini pada akhirnya terbukti setelah selama pelaksanaan WSF tidak ada keputusan yang dihasilkan secara nyata. Bahkan, kecenderungan yang terjadi adalah sulitnya mencapai titik temu dalam metodologi WSF seperti konferensi dan *workshop*. Konferensi atau *workshop* dipimpin oleh partisipan yang dianggap memenuhi kriteria, bukan dipimpin oleh sebuah badan yang memiliki kapabilitas. Dengan tidak adanya otoritas pengambilan keputusan tersebut membuat perdebatan dalam WSF cenderung tidak terarah dengan baik. Pada akhirnya “unregulated open space encourages more individual autonomy over productive activities and less coordinated planning, which can lead to wasted time and energy” (Lerner 2006).

Ironisnya, perdebatan mengenai apakah seharusnya WSF mengambil keputusan atau tidak menjadi sebuah perdebatan yang justru mengungguli perdebatan terkait isu-isu perlawanan. Perdebatan ini terbagi menjadi dua pihak, yaitu pihak yang berpendapat bahwa WSF seharusnya tetap menjadi sebuah *space* dan pihak yang berpendapat bahwa WSF sebenarnya harus menjadi sebuah *movements*. Perdebatan ini semakin memuncak ketika metodologi WSF berubah menjadi polisentrik. Ada kecenderungan pihak-pihak yang sepakat pada bentuk *space* berkumpul dengan pihak yang sependapat dan sebaliknya pihak yang sepakat dengan *movements* berkumpul dengan pihak yang sependapat. Hal ini yang pada akhirnya membuat WSF kehilangan fokus perlawanannya (Netto 2006).

Problem keempat yang ditemukan penulis adalah ketergantungan WSF terhadap pemerintah, partai politik dan ironisnya, korporasi multinasional, yang menjadi lawan dari WSF. Dalam tiga tahun pelaksanaan WSF di Brazilia, pemerintah Braziliaia sangat mendukung pelaksanaan forum tersebut. Dukungan tersebut diberikan baik berupa dukungan perijinan, tempat pelaksanaan maupun dukungan finansial. Hal tersebut secara jelas dinyatakan dalam situs resmi WSF bahwa pemerintah Rio Grande beserta kepolisian Rio Grande¹ mendukung pelaksanaan tersebut (World Social Forum Financial Support 2004). Fakta yang lebih menarik adalah bahwa dalam tiga pertemuan WSF awal, keberadaan partai politik sangat dominan. Partido dos Trabalhadores (PT), partai buruh di Braziliaia, yang merupakan partai mayoritas dalam legislatif di Rio Grande memberikan dukungan dalam kapasitasnya sebagai legislatif. Dukungan tersebut bukan tanpa sebab karena pada pertemuan WSF kedua, upaya PT dengan menggunakan WSF untuk menyebarkan pesan dan terlibat dalam propaganda politik

¹ Rio Grande merupakan propinsi di mana kota Porto Alegre berada.

cukup terlihat dengan adanya tema-tema dan promosi secara tidak langsung mengenai perjuangan PT (Kaldor 2005, 228).

Hubungan antara gerakan sosial dengan latar belakang politik negara memang tidak dapat diabaikan begitu saja. Kondisi sejarah dan politik yang berbeda dari satu negara ke negara dapat menghasilkan implikasi yang berbeda. Dalam konteks WSF yang diadakan di Brazilia, PT merupakan emanasi dari gerakan sosial, dan sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah Braziliaia. Sejak pertengahan 1980-an, perjuangan melawan kediktatoran dilakukan oleh serikat dan gerakan sosial, dan PT didirikan di tengah-tengah mobilisasi sosial yang kuat. Permasalahan terjadi setelah PT memenangkan pemilu presiden 2002 dan Luiz Inacio da Silva (Lula), secara historis pemimpin PT, menjadi presiden Brasil. PT kemudian sedikit banyak mempengaruhi kebijakan pemerintahan, yang dalam konteks ini adalah pelaksanaan WSF (Santos 2006, 55).

Adanya pengaruh dukungan tersebut terlihat ketika dibandingkan dengan pelaksanaan WSF tahun 2005 dan 2009 yang juga dilaksanakan di Braziliaia. Menurut Randazzo (2006), pada tahun 2005, PT mengalami kekalahan dalam pemilu wilayah provinsi Rio Grande do Soul. Akibatnya, pemerintah Rio Grande yang awalnya mendukung WSF berubah haluan dengan tidak mendukung WSF. Meskipun demikian, pemerintah kota Porto Alegre dan Pemerintah pusat masih memberikan dukungan sehingga pelaksanaan WSF masih dapat berjalan relatif lancar. Sebaliknya, pada tahun 2009, PT tidak lagi menjadi partai dominan di Porto Alegre sehingga pelaksanaan WSF diadakan di kota Belem yang masih dikuasai oleh PT (Pleyers 2009). Menariknya, permasalahan mengenai keterlibatan pemerintah dan partai politik dalam WSF ternyata juga mampu mempengaruhi kondisi perpolitikan domestik. Tahun 2004 perdebatan tentang peran partai politik dan pemerintahan dalam WSF muncul ke dalam agenda forum. Hal ini yang kemudian memunculkan friksi politik yang berpengaruh dalam politik domestik di India. Pihak-pihak yang tidak setuju dengan keterlibatan pemerintah India dalam WSF membentuk forum tandingan yang disebut Mumbai Resistance. Berbeda dengan WSF, Mumbai Resistance memilih jalan melawan pemerintah dan memilih perjuangan bersenjata (Iqtidar 2004).

Masalah tendensius dari pemerintahan dan partai politik juga muncul dalam pelaksanaan WSF tahun 2006 terutama di Caracas, Venezuela. Persoalan ini terkait dengan masalah pendanaan WSF yang notabene selama ini juga turut didanai oleh pihak *global north*². Pemerintahan

² Terminologi ini merupakan gambaran pembagian wilayah dunia menjadi dua yaitu pihak kapitalis diwakili *global north* dan pihak yang terksplotasi sebagai *global south*.

Venezuela yang dipimpin oleh Hugo Chavez, yang notabene sangat keras dalam melawan *global north*, menolak adanya turut campur pendanaan dari kelompok *global north*. Sebagai gantinya, pemerintah Venezuela memang membiayai pelaksanaan WSF, namun hal tersebut dirasa kurang cukup sehingga menyebabkan pelaksanaan WSF di Caracas mengalami kesulitan pendanaan (Santos 2006, 56). Kondisi ini berbeda dengan pelaksanaan WSF 2007 di Kenya. Pemerintah Kenya cenderung tidak mendukung pelaksanaan WSF secara politis. Hal ini ditunjukkan dengan penahanan partisipan WSF “hanya” karena menggunakan taman publik sebagai tempat berkumpul. Pemerintah Kenya khawatir perkumpulan ini justru akan mendatangkan perlawanan terhadap pemerintah. Sebaliknya, pemerintah Kenya lebih memanfaatkan ajang WSF sebagai penarik devisa saja (Shah 2007). Yang lebih menarik, berdasar data yang dihimpun penulis, ditemukan fakta bahwa pendanaan WSF ternyata banyak dilakukan oleh MNC dan *nongovernmental organizations* (NGOs) yang basis dananya berasal dari MNC. Kontradiksi demikian yang memunculkan kritik dari peserta WSF maupun analis. “Condemning capitalism in its Charter but actually being sponsored by and hosting a myriad of organizations, NGOs and movements that themselves seek only a ‘kinder, gentler’ capitalism” (Waterman 2009).

Pemerintah setempat, baik eksekutif, kepolisian, bank daerah maupun legislatif memainkan peranan penting dalam pelaksanaan WSF. Namun yang lebih menarik lagi adalah mencermati peranan NGO *global south* utamanya Ford Foundation (FF) dan Rockefeller Brothers Fund (RBF) pada 2003-2005. FF merupakan penyandang dana utama dalam bidang pendidikan sementara RBF dalam bidang media (World Social Forum Financial Support 2005). Pertanyaan yang muncul, apa kepentingan keduanya dalam WSF? Ford Foundation dan Rockefeller di sini berupaya “menjaga” agar forum tetap dalam koridor intelektualitasnya. Ketika tetap berada dalam koridor intelektualitas, maka tidak ada aksi nyata yang membahayakan korporasi internasional. Hal ini salah satunya ditunjukkan ketika dalam konferensi WSF, pihak Ford Foundation bersikeras agar tidak melakukan aksi *violence*. Ketika hal ini ternyata dilakukan pada 2008, Ford Foundation sudah tidak lagi menjadi pendukung WSF (Toussaint, 2010).

Berdasar data yang didapat penulis, FF juga terlibat dalam pendanaan pada WSF tahun 2001 dan 2002. Pada 2001, FF menyumbang sekitar US \$ 100.000 untuk mendukung keseluruhan acara WSF. Pada 2001 hingga 2005, FF menyumbang total US\$ 300.000 khusus untuk subyek pembahasan komunikasi internasional, feminisme, hak asasi manusia dan *defense*. Jumlah sumbangan terbesar adalah pada pelaksanaan WSF secara umum pada tahun 2003-2005 dengan jumlah sebesar US\$ 500.000. FF merupakan salah satu donatur terbesar dalam pelaksanaan

WSF selain pemerintah lokal (India Reserach Unit of Political Economy, 2005). Selain FF, penyandang dana lain yang patut dicermati adalah Petrobras. Petrobras adalah perusahaan minyak dan gas yang aktif di Bolivia, Ekuador dan Brazilia. Ironisnya, 61% saham dari Petrobras dimiliki oleh swasta yang merupakan korporasi internasional. Petrobras sendiri menyumbang setengah dari pelaksanaan WSF yang berada dalam kirasan tiga juta dolar. Di bagian dunia lain, Afrika, penyandang dana terbesar adalah CELTEL yang merupakan perusahaan multinasional yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. CELTEL merupakan penyandang dana dari WSF tahun 2006 di Bamako, Mali dan tahun 2007 di Nairobi, Kenya (Benford 2010).

Problem Perlawanan WSF sebagai Problem Strategi Multitude: Sebuah Sintesis

Keempat problem yang dihadapi oleh WSF tersebut ternyata sesuai dengan kritik-kritik yang disampaikan terhadap *multitude*. Pertama, kritik mengenai *vague concept multitude* dapat dibuktikan dengan sulitnya identifikasi sasaran perlawanan WSF selama delapan tahun sejak 2001. Kedua, kritik mengenai pengabaian proporsionalitas dalam *multitude* dapat dilihat dalam persebaran partisipan WSF yang tidak merata dan berubah-ubah tiap tahunnya. Persebaran yang tidak merata dan berubah-ubah ini menyebabkan WSF sulit mencapai konsensus dalam setiap pertemuannya. Hal ini ditambah oleh kritik ketiga, tidak adanya otoritas manajemen *power*. Akibatnya, dalam WSF terjadi anarki sehingga sulit mencapai titik temu sebuah keputusan atau alternatif yang konkrit. Terakhir, kritik terhadap pengabaian aspek material ternyata terbukti dengan kesulitan WSF terhadap pendanaan dan dukungan legal formal. Kesulitan tersebut terjadi akibat WSF mengabaikan peran negara, partai politik dan korporasi multinasional.

Secara umum, empat problem tersebut sebenarnya terjadi akibat *strategy based on commonality* yang diadopsi oleh WSF dari konsep *multitude*. *Commonality* tersebut cenderung oversimplifikasi terhadap identitas kelompok itu sendiri maupun arah perjuangannya. Asumsi *commonality* ini menyebabkan WSF melupakan identitas yang melatarbelakangi partisipan sehingga perpindahan tempat pelaksanaan dianggap bukan merupakan suatu kendala. Padahal, perpindahan tersebut justru menyebabkan permasalahan sulitnya mencapai konsensus. *Oversimplification of commonality* pula yang menyebabkan sasaran perlawanan dianggap dengan mudahnya sebagai globalisasi neoliberal, padahal sentral globalisasi neoliberal sendiri sulit ditemukan secara pasti. Pada akhirnya, *commonality* pula yang mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang penting sama, hingga melupakan aspek material. Meskipun demikian, perlu diingat bahwa WSF merupakan

sebuah proses (Charter of Principle 2001, poin 3). Ke depannya segala kemungkinan masih mungkin terjadi asal tidak melupakan strategi perlawanan sebagai pekerjaan rumah pertama untuk diperbaiki.

Daftar Pustaka

Buku

- Boron, Atilio, 2005. *Empire and Imperialism: a Critical Reading of Michael Hardt and Antonio Negri*, terj. Jessica Casiro. London: Zed Books.
- Foran, John, 2005. *Taking Power: On the Origins of Third World Revolutions*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hamel, Pierre et al., 2001. *Globalization and Social Movements*. New York: Palgrave MacMillan.
- Kaldor, Mary et al. (eds.), 2006. *Global Civil Society 2005/2006*. London: Sage Publications.
- McGann, Anthony. 2006. *The Logic of Democracy: Reconciling Equality, Deliberation and Minority Protection*. Michigan: The University of Michigan Press.
- Petras, James dan Veltmeyer, Henry. 2006. *Empire with Imperialism: The Globalizing Dynamics of Neoliberal Capitalism*. London: Zed Books.
- Santos, Boaventura De Sousa. 2006. *The Rise of Global Left: the World Social Forum and Beyond*. London: Zedbooks.
- Sen, Jai, 2004. "A Tale of Two Charters," dalam Escobar, A., dan P. Waterman (eds.), 2004. *World Social Forum: Challenging Empires*. New Delhi: Viveka Foundation.

Artikel Jurnal

- Bull, Malcolm, 2001. You Can't Build a New Society with a Stanley Knife. *London Review of Books*, 23 (19): 3-7.
- Gobrin-Morante, C. 2002. The World Social Forum Fights Imperialist Globalization," dalam Nisula, L. dan K. Sehm-Patomäki (eds.), 2002. "We, the Peoples of the World Social Forum. *Network*

Institute for Global Democratization Discussion Paper, 2: 19–21.

Jhamtani, Hira, 2003. Perjuangan Menggapai Kembali Kemanusiaan: Refleksi dari Forum Sosial Dunia. *Civic* 1 (1).

Shah, Rebecca, 2007. What's the World Coming to? The World Social Forum Beyond Critique and Deconstruction. *In-Spire e-Journal*, June, 2 (1).

Smith, Peter dan Elizabeth Smythe, 2010. (In) Fertile Ground? Social Forum Activism in Its Regional and Local Dimension. *Journal of World-Systems Research*, American Sociological Association, XVI (1): 6-28.

Situs Resmi Online

World Social Forum, 2002. World Social Forum Charter of Principles [online], dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/main.php?id_menu=4&cd_language=2 [diakses 2 April 2010].

_____, 2003. Numbers of WSF 2003 [online]. dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=memoria_numeros_ing [diakses 8 April 2010].

_____, 2004. Financial Supports 2004 [online]. dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=apoiadores_2004_ing [diakses 6 April 2010].

_____, 2004. Statistics of WSF 2004 [online]. dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/noticias_01.php?cd_news=954 [diakses 9 April 2010].

_____, 2005. Financial Supports 2005 [online], dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=apoiadores_2005_ing [diakses 6 April 2010].

Artikel Online

Barnett, Anthony, 2007. Three Faces of World Social Forum. [online]. dalam <http://www.globalpolicy.org/component/content/article/174advocacy/30721.html> [diakses 12 April 2010].

Benford, Olivier, 2010. Has the World Social Forum been co-opted by capitalism? Does it have a future? [online]. dalam <http://links.org.au/node/1540> [diakses 16 April 2010].

- Burbach, Roger, 2002. The World Social Forum In Porto Alegre: A Wind of Hope in a World At War. [online]. dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic/eng_b_RogerBurbach.php [diakses 4 April 2010].
- Callinicos, Alex, 2004. A Festival of the Oppressed. [online]. dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=bal_calinico_2004_i [diakses 5 April 2010].
- India Reserach Unit of Political Economy, 2004. Funds for the World Social Forum. [online]. dalam <http://www.rupe-india.org/35/app2.html> [diakses 15 April 2010].
- Institute Research on World System, 2007. Intelligentsia, Academics, Students and Other Participants at the World Social Forum. [online]. dalam <http://www.irows.ucr.edu/papers/irows37/irows37.htm> [diakses 14 April 2010].
- _____, 2008. Surveys of World Social Forum Participants Show Influence of Place and Base in the Global Public Sphere. [online]. dalam <http://www.irows.ucr.edu/papers/irows45/irows45.htm> [diakses 13 April 2010].
- Iqtidar, Humera, 2004. NGO Factor at WSF Worries Activists. [online]. dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=bal_iqtidar_2004_ing [diakses 14 April 2010].
- Klein, Naomi, 2002. A Fete of The for the End of the End of History. [online]. dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic/eng_bnaomi.php [diakses 3 April 2010].
- Lerner, Josh, 2006. Why the World Social Forum Needs to Be. [online]. dalam <http://www.globalpolicy.org/component/content/article/174-advocacy/30704.html> [diakses 14 April 2010].
- Media Democracy Project, 2005. Global Protest Cycle. [online]. dalam <http://mediademocracyproject.org/page01.php?goto=globalProtestCycle> [diakses 17 April 2010].
- Netto, Anil, 2006. World Social Forum: Polycentric and Losing Focus. [online]. dalam <http://www.globalpolicy.org/component/content/article/174-advocacy/30709.html> [diakses 14 April 2010].
- Pleyers, Goeffrey, 2009. World Social Forum 2009: A Generation's Challenge. [online]. dalam <http://www.opendemocracy.net/article/world-social-forum-2009-a-generation-s-challenge> [diakses

13 April 2010].

Savio, Roberto, 2007. From World Social Forum to World Social Movements. [online]. dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/noticias_textos.php?cd_news=345 [diakses 9 April 2010].

Teivainen, Teivo, 2003. World Social Forum: What Should It Be When It Grows Up? [online]. dalam http://www.forumsocialmundial.org.br/dinamic.php?pagina=bal_teivo_ing [diakses 5 April 2010].

_____, 2009. Back in Africa, Forward to Another World: Challenges of the World Social Forum 2011 in Dakar. [online]. dalam <http://alainet.org/active/30329&lang=pt> [diakses 14 April 2010].

Toussaint, Eric, 2010. Has the World Social Forum been co-opted by capitalism? Does it have a future? [online]. dalam <http://links.org.au/node/1540> [diakses 16 April 2010].

Waterman, Peter, 2009. Trade Unions, the World Social Forum, Turbulent Priests, and the Global Justice Movement. [online]. dalam <http://blog.choike.org/eng/peter-waterman/756> [diakses 14 April 2010].

Yla-Antilla, Tuomas. 2005. Is Structurlessness Democratic? [online]. dalam <http://www.globalpolicy.org/component/content/article/174-advocacy/30700.html> [diakses 14 April 2010].